

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Reformasi juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma diberbagai bidang kehidupan salah satunya yakni bidang pariwisata. Karena pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang penting untuk dikembangkan. Keanekaragaman budaya, penduduk serta keindahan alam yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang penting untuk mendukung berkembangnya pariwisata, karena tidak selamanya Indonesia dapat bergantung pada sektor migas sebagai sumber devisa utama. Diharapkan sektor pariwisata menjadi sarana efektif untuk membangkitkan pengetahuan yang lebih baik mengenai suatu negara, masyarakat dan budayanya

Berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata yang bertumpu pada daerah dalam pelaksanaannya, munculnya paket Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan harapan baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya. Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini merupakan angin segar bagi daerah-daerah otonom untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui sektor pariwisata. Karena bagi Indonesia, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat berarti, baik dalam peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan lapangan pekerjaan, memajukan perekonomian, hingga kontribusi dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan budaya yang makin arif dan bijaksana.

Sesuai dengan ketentuan MPR-RI NO.XV/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹

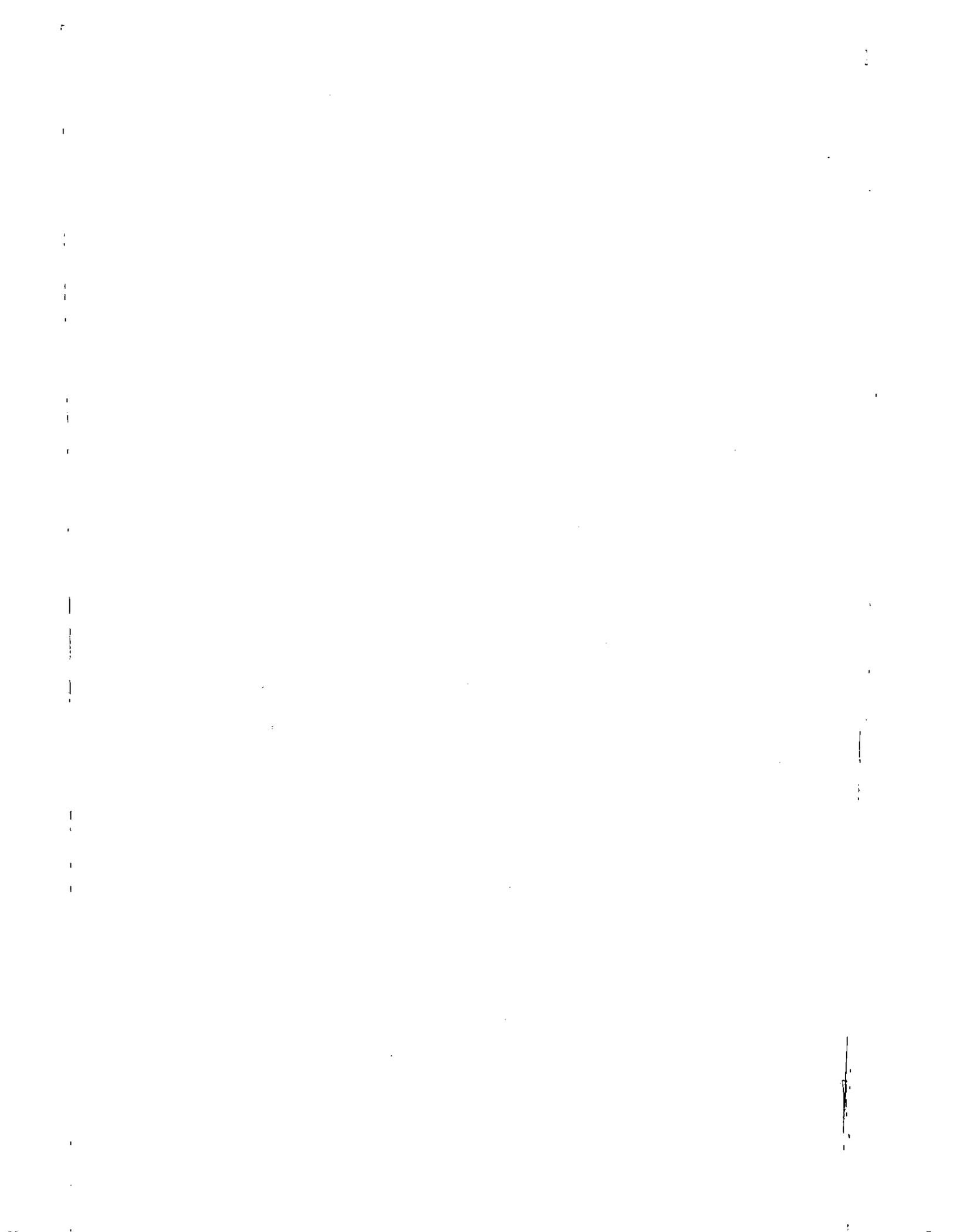
Ada empat faktor yang dapat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu:²

1. Manusia pelaksanaannya harus baik dalam arti memiliki moral dan mental yang jujur, bertanggung jawab, bersikap sebagai abdi masyarakat (public servant) dan memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi.
2. Keuangan harus cukup dan baik dalam arti semakin besar jumlah uang yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakannya serta dikendalikan secara baik melalui anggaran baik dalam bentuk maupun susunannya.
3. Peralatan harus cukup dan baik dalam arti sesuai dengan kebutuhan dan mampu dioperasikan secara teknis oleh sumber daya manusia yang ada.
4. Organisasi dan manajemen harus baik dalam arti ramping, efisien, dan produktif.

Dengan keberadaan Otonomi Daerah inilah yang menjadi motivasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menggali potensi yang dimiliki di setiap wilayahnya dengan sebaik mungkin. Karena pariwisata dan usaha kepariwisataannya merupakan salah satu sub sektor pembangunan yang terus

¹Deddy Supriadi dan Dadang S, *Otomomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 2.

²Lesan Bismillah, *Prinsip Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Bojo Grafika Percetakan



menerus diupayakan pengembangannya secara efektif dan efisien agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan perekonomian. Peran dan kontribusi yang signifikan tersebut telah menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang perlu ditangani secara serius dan profesional.

Pengembangan pariwisata memerlukan peran dan kontribusi dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran dan kontribusi menurut fungsi dan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah secara khusus akan lebih berkonsentrasi sebagai fasilitator dan regulator, sementara pihak swasta berperan sebagai pelaku dan ujung tombak pengembangan dan berhubungan langsung dengan produk dan pasar. Selanjutnya masyarakat sebagai bagian penting dalam kegiatan pembangunan perlu juga dikembangkan fungsi dan kapasitasnya sehingga masyarakat dapat berperan strategis tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan, namun sekaligus menjadi pelaku yang mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya masing-masing.

Salah satu aspek penting dan mendasar bagi keberhasilan pengembangan pariwisata adalah iklim kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di suatu tempat. Iklim kondusif tersebut khususnya terkait dengan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk dapat secara serius dan bersama-sama bekerjasama mengembangkan sektor pariwisata. Dukungan tersebut mencakup dukungan keseriusan dan komitmen pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) untuk

menggerakkan sektor kepariwisataan di daerahnya, dukungan dari sektor swasta/

pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan dan memasarkan produknya maupun dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Yogyakarta memiliki potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah yang cukup memadai untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Obyek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Bantul, antara lain:

1. Pantai Parangtritis
2. Pantai Samas
3. Pantai Pandansimo
4. Pantai Patehan
5. Pantai Cangkring
6. Pantai Kwaru
7. Bendung Tegal
8. Goa Slarong
9. Goa Cerme

Sedangkan obyek wisata sejarah yang dimiliki Kabupaten Bantul dan

Disamping itu Kabupaten Bantul juga memiliki obyek wisata budaya yang cukup potensial, yakni:

1. Desa wisata Kebonagung
2. Desa wisata Kreet
3. Desa wisata Pundong
4. Kerajinan keramik kasongan
5. Kerajinan kulit Manding
6. Kerajinan wayang kulit Pucung

Dari banyaknya obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bantul tersebut diperlukan adanya kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang diarahkan pada:

1. Pengembangan manajemen, obyek, sarana, dan prasarana wisata secara terpadu dalam rangka menarik minat wisatawan.
2. Terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi dan wisatawan.

Pariwisata pedesaan akhir-akhir mulai dilirik dan dikembangkan untuk menjadi primadona dan meningkatkan ekonomi pedesaan dengan memberdayakan potensi desa menjadi daya tarik wisata domestik maupun wisata mancanegara. Sangat realitis bila desa dengan perangkat dan potensinya mengoptimalkan potensi yang ada untuk menstimulasi unsur-unsur desa untuk lebih meningkat. Pengembangan pariwisata Indonesia juga harus berwawasan pengembangan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Dengan

kondisi desa yang bersih dan tertata sekaligus sebagai konservasi lingkungan maka desa ini secara otomatis menjadi tujuan wisata. Dari situlah penghasilan masyarakat bisa bertambah.

Adapun prioritas pengembangan pariwisata, antara lain:

1. Pemandangan alam yang indah
2. Kehidupan alam yang indah
3. Kebudayaan masyarakat
4. Kerajinan dan kesenian
5. Pantai

Dalam skala prioritas tersebut sikap masyarakat setempat sangat berperan dalam pengembangan dan pelestariannya.

Desa Wisata Kebonagung merupakan desa wisata pendidikan dan budaya yang berbasis pertanian di kampung Jawa. Terletak 17 km di sebelah selatan kota Yogyakarta, berada 3 km dari pusat kecamatan Imogiri sehingga memungkinkan untuk wisatawan untuk berkunjung dengan mudah. Disamping itu lokasinya yang strategis karena berdekatan dengan obyek wisata makam raja-raja, goa cerme, pantai parangtritis, pusat kerajinan, batik, kulit, rotan, keris, dll.

Desa wisata Kebonagung terbentuk pada Tahun 2000, yang di prakarsai oleh masyarakat sekitar dalam suatu kelompok sadar wisata atau disingkat *pokdarwis*. Yakni suatu elemen sosial sebagai penggerak utama masyarakat mendukung kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan dilingkungan tempat tinggalnya dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan umum. Tujuan pokoknya

yakni menjadi motivator dan komunikator dalam upaya menjadikan masyarakat disekitar obyek dan daya tarik wisata menjadi masyarakat yang sadar wisata dan dapat memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, ikut berperan aktif dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya, serta turut membantu pemerintah dalam mewujudkan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk menjaga citra baik kepariwisataan daerah khususnya dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya.

Tujuan umum dari pembentukan *pokdarwis* yakni:

1. Meningkatkan pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah guna peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat setempat.
2. Memperkenalkan dan melestarikan serta memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang ada di daerahnya.
3. Terciptanya masyarakat yang sadar wisata dan menerapkan sapta pesona dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan tujuan khusus dari pembentukan *pokdarwis* yakni:

1. Memberdayakan sumberdaya manusia yang terdapat disekitar obyek dan daya tarik wisata untuk dapat menjadi tenaga yang produktif serta dapat membuka lapangan kerja baru di bidang pariwisata.
2. Agar dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada untuk menjadi obyek dan daya tarik wisata yang dapat dikelola dan dinikmati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara

3. Memanfaatkan dan mengelola seni budaya yang ada menjadi daya tarik dan atraksi wisata yang dapat disajikan kepada wisatawan.
4. Dapat menjadi penggerak dalam menciptakan citra pariwisata yang baik dengan meningkatkan mutu pelayanan dan keramah-tamahan serta menjadi tuan rumah yang baik .
5. Dapat berpartisipasi dalam membantu memasyarakatkan sadar wisata dan menerapkan sapta pesona sehari-hari.

Berlokasi di Desa Kebonagung, obyek wisata Bendung Tegal yang di bangun pada tahun 1998 akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang selama ini berkunjung di Kabupaten Bantul. Selain itu, dukungan masyarakat sekitar yang masih menjaga warisan budaya lokal akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan wisatawan. Selain cocok untuk wisata dan olah raga air, di lokasi bendungan air ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas dan sarana penunjang seperti :kolam pemancingan, wisata perahu, rumah makan dan sebagainya. Tersedia juga tempat olah raga air seperti dayung, pendidikan SAR, Renang, dan memancing.

Selain itu desa Kebonagung memiliki potensi daerah maupun nasional, yakni:

1. Tahun 1984, juara nasional swasembada pangan insus padi
2. Tahun 1984, sebagai pusat study hama tanaman dari 23 negara
3. Tahun 1997, juara I insus kedelai tingkat propinsi DIY
4. Tahun 1998, juara pertama insus kedelai tingkat nasional

5. Tahun 1999, juara II lomba klompencapir tingkat propinsi DIY
6. Tahun 1999, mengikuti agro expo tingkat nasional di Jakarta
7. Tahun 2000, juara II terbaik pembina lingkungan tingkat propinsi DIY
8. Pusat kajian varitas-varitas padi tipe baru dari BALITPA
9. Pusat peluncuran varitas padi tipe baru oleh MENRISTEK.

Akan tetapi dalam pengembangan pariwisata ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu, berkaitan dengan keterbatasan kemampuan pembiayaan kepariwisataannya dan pemeliharannya menyebabkan:

1. Potensi obyek wisata dan penunjangnya belum bisa sepenuhnya dikembangkan secara optimal
2. Pola dan strategi pemasaran belum maksimal dilaksanakan
3. Belum memadainya sarana dan prasarana pariwisata
4. Lemahnya manajemen kepariwisataannya.

Dari hal diatas diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengembangan dan pengelolaannya dapat mengarahkan pembangunan sektor pariwisata menjadi andalan. Selain itu pengembangan dan pengelolaan pariwisata diupayakan mampu mengalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, seperti menyediakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Begitu rumitnya lika-liku permasalahan di bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata pada khususnya dan pemerintah pada umumnya yang masih sangat membutuhkan perhatian untuk mencari

solusinya, karena dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Bantul memiliki potensi di sektor pariwisata yang apabila dapat dikelola dengan baik dan juga dikembangkan agar lebih berkualitas dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung di obyek wisata yang berada di Bantul. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi *“PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA KECAMATAN IMOIRI KABUPATEN BANTUL.”*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penyusun mencoba merumuskan masalahnya adalah:

- 1. Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?*
- 2. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan Desa Wisata?*

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul : Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Kebijakan pengembangan Desa Wisata Di Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul bertujuan untuk mengetahui

peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengembangan Desa Wisata di Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Bagi penyusun dapat mengetahui lebih jauh tentang peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengembangan Desa Wisata Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Secara praktis dapat sebagai masukan kepada Dinas Pariwisata Bantul, apakah peran dalam kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuannya.
3. Mendorong pembangunan daerah, sehingga dengan kegiatan pariwisata ini dapat merangsang pembangunan sektor-sektor lainnya.
4. Sebagai bahan pembandingan dan sebagai sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan topik dan permasalahan yang sama.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan atau dipakai dalam melakukan penelitian sehingga aktivitas penelitian ini menjadi sistematis ialah

Namun sebelum membahas lebih jauh tentang variabel-variabel dalam penelitian ini dengan teori-teori yang dikemukakan, maka perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan 'teori' itu:

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi teori adalah:

*"Serangkaian asumsi konsep, kontrol, definisi, dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep."*³

Sedang menurut Koentjoroningrat teori adalah:

*"Pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu di dalam masyarakat."*⁴

Berdasarkan pada teori yang dijelaskan maka penyusun akan menerangkan mengenai teori yang digunakan:

1. Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Block, pengertian peran yakni *suatu konsep yang dipakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntunan peranan yang dilakukannya.*⁵

Dari pendapat di atas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dan posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989. hlm 37.

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997. hlm 9

⁵ Herbert M. Block, *La. Berencana: Penelitian Sosial Terhadap Perilaku dan Peranan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989. hlm 10

Peranan menurut Astrid S. Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu:

Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
3. Peranan dapat juga di artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁶

Dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki kelebihan ganjaran sosial lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain, individu memiliki kedudukan yang dominan atas individu yang lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber lain. Selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh secara periodik.

Status yang dimiliki seseorang tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan

⁶ Astrid S. Susanto, *Peranan Sosial dan Perubahan Sosial*, Pina Cita, 1982, hlm 95

seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang. Demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

b. Indikator Peran

Indikator peran pemerintah secara umum menurut fungsinya dapat di bagi menjadi 3 hal, yakni:

1. Pengaturan

Pengaturan (regulasi) merupakan fungsi pemerintahan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundangan. Namun di samping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, juga lembaga-lembaga departemen maupun non departemen.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan (empowerment) merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi politik hukum sosial budaya dan sebagainya

Pemberdayaan dari aspek politik adalah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak serta kewajibannya sebagai warga negara dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan. Namun tentu saja jika pemberdayaan itu harus dimulai dari atas maka untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah perlu diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek imitasi dan keteladanan dari aparat pemerintah itu sendiri.

3. Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan ini juga bisa berarti *civil services* maupun *public services*, hanya saja dalam *civil services* pasti dilaksanakan oleh pemerintah sementara *public services* bisa dikerjakan oleh pemerintah, bekerja sama dengan swasta maupun dilaksanakan swasta itu sendiri. Dengan *civil services* dimaksudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga negara tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya atauun kesemuanya imbalan yang mampu diberikan

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah lembaga atau satuan organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat. Dalam bentuknya sehari-hari dapat diuraikan sebagai suatu badan atau organisasi yang mengingatkan kepada prosedur, jenjang, negara, propinsi, kabupaten, kotamadya dan lain-lain.⁷

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.⁸ Ketentuan tentang pemerintah diatur dalam Undang-undang otonomi Daerah No 22 / 1999. Berdasarkan Undang-undang No 22 / 1999 tentang pemerintahan daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No 22 / 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran-peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu UU No 22 / 1999 menetapkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

⁷ Sitanggang .H, Drs, *Filsafat dan Etika Pemerintahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah, hal 2

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah.⁹

Sedang otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud dan tugas serta kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sedang dalam penyelenggaraannya, didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan

di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

⁹ Deddy Supriady B,ph.D, Dadang Solihin MA, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan dan menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di samping itu, pemerintahan yang ada juga harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber dana lainnya yang tersedia secara efisien. Dalam konteks ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur yang bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan untuk otonomi di Daerah Kabupaten dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten / DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Bupati sebagai unsur pemerintah daerah dan pemimpin daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan umum dan menyelenggarakan segala kewenangan daerah serta melaksanakan tugas

Didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dituntut untuk semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan potensi yang ada di daerahnya termasuk mengaplikasikannya dalam wujud pembangunan yang nyata. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Jadi pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.

3. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Secara umum Dinas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

Organisasi dari Dinas Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan
3. Bidang yang membawahi Seksi sebagai unsur pelaksana

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas terdiri dari:

1. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha
2. Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 seksi
3. Masing-masing bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 2 seksi
4. Unit pelaksana Teknik Dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan

4. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata dewasa ini lebih dikenal umum dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang cepat dan pesat, sehingga keberadaan suatu wilayah maupun suatu daerah yang berpotensi wisata alam, wisata budaya, maupun wisata sejarah dapat di ketahui umum dengan mudah.

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain bersifat sementara dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha

mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu.¹⁰

Menurut UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata istilah pariwisata berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Sedangkan pengertian pariwisata itu sendiri adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan/ keinginan yang bermacam-macam.

b. Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata di dalam pembangunan mencakup beberapa segi yaitu:

1) Segi Ekonomi

Dengan keberadaan pariwisata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pada khususnya untuk dijadikan tempat mencari nafkah atau mata pencaharian. Perkembangan pariwisata dapat merangsang tumbuh kembangnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya keberadaan pariwisata mampu memperluas dasar-dasar perekonomian suatu negara.

2) Segi Seni Budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni budaya yang dikunjungi. Masyarakat sekitar haruslah pintar menyaring budaya-budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia, yakni dengan mempelajari budaya asing yang positif tapi tidak meninggalkan budaya sendiri yang telah dimiliki dengan tetap mempertahankannya.

3) Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Wisatawan yang berkunjung di suatu lokasi pariwisata adalah ingin mendapatkan suatu tempat atau suatu daerah dengan suasana yang baru yang jarang bahkan belum pernah dikunjungi. Dengan pemeliharaan lingkungan yang baik maka dapat mengembangkan keberadaan pariwisata, sebaliknya apabila pengembangan pariwisata tidak teratur dan tidak terarah maka dapat merusak lingkungan alam sebagai obyek pariwisata.

4) Memperluas Nilai-nilai Pergaulan hidup dan pengetahuan

Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain serta penyerapan pengetahuan baru. Baik penyerapan ilmu

5) Memperluas Kesempatan Kerja

Industri pariwisata merupakan industri yang sifatnya menyerap kebutuhan tenaga kerja, tidak hanya membutuhkan tenaga mesin saja, melainkan membutuhkan sumber daya manusia. Sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah, dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir, dan sebagainya maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan semakin banyak lagi. Dengan semakin banyaknya keberadaan tempat pariwisata berarti semakin banyak juga dibutuhkan keberadaan sumber daya manusia.

6) Menunjang Perbaikan Kesehatan dan Prestasi Kerja

Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana yang baru maupun lingkungan baru walaupun lingkungan baru hanya untuk sementara waktu.

c. Sasaran Pariwisata

Pada dasarnya sasaran pariwisata yakni ditujukan pada masyarakat umum tanpa memandang status sosialnya. Karena keberadaan pariwisata itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat yang ingin

Bagi masyarakat umum, sasaran pariwisata dapat di kelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Wisatawan dalam negeri/ wisatawan domestik

Yakni sasaran pariwisata ini ditujukan bagi masyarakat di dalam negeri itu sendiri.

2. Wisatawan luar negeri/ wisatawan manca negara

Yakni sasaran pariwisata ditujukan bagi wisatawan luar negeri atau manca negara agar mereka tertarik untuk datang dan berkunjung, tentunya dengan menonjolkan kelebihan obyek wisatanya.

5. Desa Wisata

Menurut Subagyo, desa wisata adalah merupakan bentuk desa yang memiliki ciri khusus di dalamnya, baik alam dan budayanya, serta berpeluang dijadikan komoditas bagi wisatawan. Wujud desa itu sendiri bahwa desa sebagai obyek dan subyek pariwisata. Sebagai obyek, merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan desa wisata itu sendiri.¹¹

¹¹ Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si dan Drs. Suranto, M.Pol. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Desa*

Menurut **Condroyono**, desa wisata adalah wilayah yang memiliki keunikan dan daya tarik wisata baik berupa karakteristik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakat.¹²

Sedang menurut **Ahimsa-putra**, desa wisata adalah kawasan pemukiman yang ada di daerah pedesaan, baik secara sengaja maupun tidak, telah menjadi kawasan yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan karena adanya daya tarik/obyek wisata yang ada, dan di desa ini wisatawan dapat menginap.¹³

Sedangkan pengertian desa wisata itu sendiri yakni suatu wilayah yang terletak di pedesaan dengan kondisi desa yang tertata dan mempunyai keistimewaan baik alam maupun budayanya serta memberdayakan desa dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan berwawaskan lingkungan sehingga menjadi daya tarik wisata domestik maupun mancanegara.

Tujuan dan sasaran pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian seni dan budaya serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan jenis dari desa wisata dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni:

1. Desa Wisata Alam

Merupakan bentuk dari sebuah pedesaan yang cukup potensial untuk dijadikan sebagai objek wisata karena memiliki keadaan alam yang mampu

dijadikan daya tarik wisata, sehingga mampu memancing para wisatawan dapat berkunjung untuk menikmati keindahan alamnya. Secara umum potensi obyek/daya tarik wisata alam dapat berupa aspek-aspek seperti: flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam atau taman nasional maupun kelautan, yang biasanya sering dikemas dalam bentuk wisata petualangan arung jeram, penjelajahan hutan, dan sebagainya, dimana wisatawan terlibat secara fisik, mental dan emosional dengan obyek dan daya tarik wisata yang dikunjunginya.

2. Desa Wisata Budaya

Merupakan wujud dari sebuah pedesaan yang memiliki kelebihan dibanding daerah lain karena memiliki potensi budaya yang tidak dimiliki daerah lain, wisatawan yang berkunjung dapat mengetahui dan belajar tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada berbagai bentuk peninggalan sejarah dan budaya, yang berupa: artefak, struktur situs arkeologis dan sebagainya. Termasuk dalam jenis wisata ini adalah penggalian/ eskavasi situs peninggalan sejarah, wisata arsitektural.

3. Desa Wisata Sejarah

Merupakan wujud dari sebuah pedesaan yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki daerah lain, para wisatawan yang berkunjung selain dapat mengetahui sejarah atau histori desa wisata tersebut, juga dapat mengetahui

berorientasi pada budaya kehidupan masyarakat, dapat berupa adat istiadat, kesenian, kerajinan, masakan, budaya religius dan sebagainya. Termasuk dalam jenis wisata ini adalah wisata esoterik, wisata pedesaan.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan yakni “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.” Untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam penelitian, ada baiknya peneliti memaparkan secara konseptual definisi-definisi tersebut:

Adapun pengertian atau definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Peran

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

4. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan/ keinginan yang bermacam-macam.

5. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu wilayah yang terletak di pedesaan dengan kondisi desa yang tertata dan mempunyai keistimewaan baik alam maupun budayanya serta memberdayakan desa dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan berwawaskan lingkungan sehingga menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Masri Singarimbun definisi operasional adalah:

Suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel agar dalam penelitian ini memperoleh data yang valid dan sesuai

dengan keadaan di lapangan, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian dengan menentukan indikator-indikatornya.

Pengukuran variabel merupakan inti dari penelitian ilmiah, semakin peka satuan pengukuran dari satu variabel maka semakin besar kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Adapun aspek-aspek dan indikator-indikator dari Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ialah:

1. Peran pemberdayaan, adapun beberapa fungsi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk memberdayakan masyarakat sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, diantaranya adalah:

a. Pengembangan Pariwisata Pedesaan

Pengembangan pariwisata pedesaan merupakan arah dan kebijakan pengembangan daerah yang berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

b. Pengembangan Budaya

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam dan minat khusus melalui berbagai bentuk pengembangan pariwisata yang berkeadilan lingkungan dengan sasaran tumbuh kembangnya seni budaya

c. Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Bertujuan menjadi motivator dan komunikator dalam upaya menjadikan masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik wisata menjadi masyarakat yang sadar wisata dan dapat memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, ikut berperan aktif dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya, serta turut membantu pemerintah dalam mewujudkan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk menjaga citra baik kepariwisataan.

d. Pemberdayaan Masyarakat Pada Sektor Pariwisata

Bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mampu menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat. Meliputi pelatihan pramuwisata, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan ketrampilan manajemen usaha dan pelatihan homestay.

2. Peran Pelayanan, adapun beberapa bentuk pengelolaan pariwisata diantaranya adalah:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

- (1) Pembangunan Fisik, yakni meliputi pengadaan sarana pendukung dragon boat dan pengadaan perahu naga 3 unit serta Pembuatan MCK 12 unit.
- (2) Pembangunan Non Fisik, yakni meliputi peningkatan kualitas pelayanan terhadap wisatawan agar merasa nyaman.

b. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Promosi atau pemasaran pariwisata yang dilakukan yakni dengan pemasangan pamflet dan penunjuk arah ke lokasi obyek wisata yang di pasang di pinggir jalan yang strategis menuju obyek wisata.

G. METODE PENELITIAN

Menurut Winarno Surachmad , pengertian metode penelitian adalah:

*"Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan mempergunakan teknik data dan alat-alat tertentu. Cara utama itu diperoleh setelah penyidik memperhitungkan atau ditinjau dari tujuan penyidik serta dari suatu penyidik."*¹⁴

Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metodologi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Jacob Vredenberg ada tiga penelitian, yaitu:

1. Penelitian eksploratif (*exploratif research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk membangun teori.
2. Penelitian verifikatif (*verificatife research*) merupakan penelitian yang menguji satu hipotesis.

¹⁴ Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Pengajaran, Temite Bandung, 1978, Hlm 121

3. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menggambarkan, melukiskan dan menginterpretasikan secara jelas dan utuh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana pembangunan daerah. Berhubungan tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan suatu fenomena sosial yang jelas, faktual dan cermat, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif.

Adapun metode penelitian ini adalah:

1. jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara sistematis dari situasi, fenomena, dan program pelayanan atau penyediaan informasi tentang kondisi kehidupan masyarakat atau menggambarkan tentang sikap-sikap terhadap issue-isue tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dari penyusunan skripsi ini yaitu di Kabupaten Bantul dalam hal ini pada kantor dinas pariwisata terutama dalam usaha pengembangan Desa Wisata Kebonagung. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul memiliki Sumber Daya Alam yang sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama dalam bidang wisata salah satunya di Bendung Tegal yang ikut menunjang potensi wisata yang dimiliki Desa Kebonagung.

¹³ Joseph W. Handayani, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1982

3. Data dan sumber data

Ada dua sumber jenis data yang penyusun gunakan, yakni data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yakni data yang autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan.

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, serta pihak-pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pengembangan desa wisata Kebonagung.

b. Data Sekunder

Yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, karena diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Sumber data ini diperoleh dari buku-buku, media massa, laporan penelitian, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti buku-buku yang menjelaskan kebijakan-kebijakan mengenai hal kepariwisataan, terutama sejalan dengan program otonomi daerah.

4. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada obyek yang sedang diteliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

b. Teknik Interview

Teknik interview ini dipergunakan karena dalam pengumpulan data ini penyusun mengadakan wawancara, komunikasi langsung dengan responden di lingkungan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pengembangan sektor kepariwisataan pada desa wisata Kebonagung.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa buku-buku, surat-surat, catatan dokumen atau laporan-laporan, peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan tertulis yang terdapat di lokasi penelitian.

Dokumen menurut Winarno Surachmad adalah:

“Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pencatan-pencatatan atau pengambilan gambar-gambar dari dokumentasi yang terdapat ditempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti”.¹⁶

¹⁶ Winarno Surachmad, Op cid, Hlm 135.

5. Analisis Unit

Unit analisis bisa dipahami sebagai obyek nyata yang akan diteliti. Biasanya unit analisis ini. Terutama dalam penelitian survey adalah individu, tetapi dalam penelitian tertentu unit analisisnya dapat berupa pasangan suami istri, keluarga, lembaga-lembaga atau suatu kelompok masyarakat tertentu.¹⁷

Yang dijadikan sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
2. Ketua dan anggota POKDARWIS
3. Masyarakat sekitar selaku Pengelola Obyek desa wisata Kebonagung.

6. Teknik Data Analisis

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisa data secara kualitatif. Penelitian ini untuk menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisa data maka yang diperoleh akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga akan memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya. Secara urut proses pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Menelaah setiap data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara ataupun studi pustaka.

- 2) Setelah ditelaah data kemudian disusun ke dalam satuan-satuan yang dikategorikan.
- 3). Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus faktual yang berkaitan
- 4). Langkah terakhir yang dilakukan yakni menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan sekaligus rekomendasi

Sedang menurut S. Nasution, analisis adalah:

*“proses menyusun data agar dapat diklarifikasikan. Melakukan analisa data adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras, daya kreatif serta intelektual tinggi”.*¹⁸

Dari apa yang dikatakan Nasution di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak ada satupun metode yang dapat dijadikan pegangan dalam menganalisa data yang terkumpul. Oleh karena itu pada penelitian ini, penyusun akan menggunakan model analisa kualitatif, yaitu: “Usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh”